



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Kebijakan Pengadaan Aparatur Sipil Negara

**Aba Subagja, S.Sos., M.AP., M.H.**

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur

Jakarta, 31 Oktober 2023

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara

1

UU No. 5 Tahun 2014  
tentang **Aparatur Sipil  
Negara**

2

PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No.  
17 Tahun 2020 tentang **Manajemen  
PNS**

PP No. 49 Tahun 2018 tentang  
**Manajemen PPPK**

ASN sebagai **profesi** yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan **wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit** dalam pelaksanaan Manajemen ASN







**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Manajemen ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

## Prinsip Meritokrasi

Setiap **Warga Negara Indonesia** mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah memenuhi persyaratan. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui **penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain** yang dibutuhkan dalam jabatan.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

# PNS

PP 11 TAHUN 2017  
MANAJEMEN PNS jo. PP  
17 TAHUN 2020



PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA

# PPPK

PP 49 TAHUN 2018  
MANAJEMEN PPPK

## PNS & PPPK

Mengisi Jabatan Pemerintahan

&

Melaksanakan Tugas Pemerintahan

# Tujuan dan Prinsip Pengadaan

## Calon Aparatur Sipil Negara

Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik.

1

3

Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi.

Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

4

Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

**Pengadaan CASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:**

kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.



# KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2023

Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan CPNS

1

Keputusan Menteri PANRB No. 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi CPNS

Peraturan Menteri PANRB No. 14 /2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional

1

Keputusan Menteri PANRB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK JF

2

Keputusan Menteri PANRB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK JF Guru

3

Keputusan Menteri PANRB No. 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi

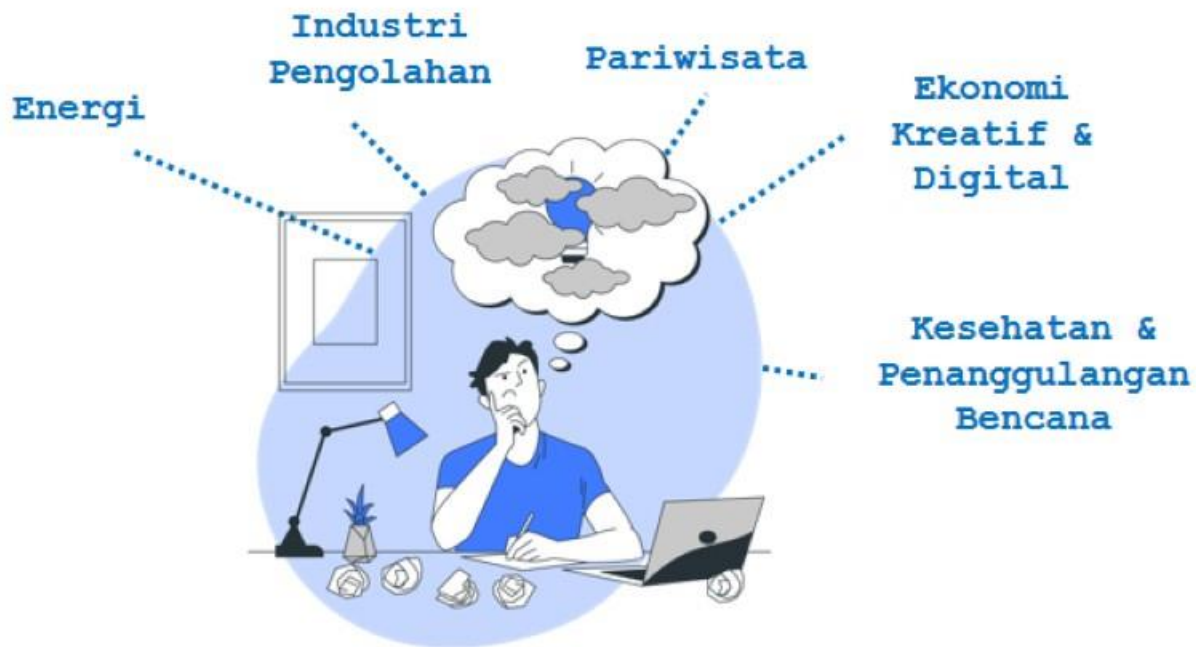
4

Keputusan Menteri PANRB No. 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK JF



## Pemenuhan Jabatan Teknis sesuai Prioritas Nasional

\*\*peningkatan nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi di sektor riil, dan industrialisasi



## Pemenuhan Sektor Pelayanan Dasar

\*RPJMN 2020-2024, Lampiran I, BAB 2 Hal. 31; Rapat Teknis PIC

Penyusunan Kebijakan COL ASN, Feb 2021.

1

**Pendidikan**

2

**Kesehatan**

3

**Penegakan Hukum**

## ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2023

01

Fokus pada pelayanan dasar (GURU DAN TENAGA KESEHATAN) dengan seoptimal mungkin **menyelesaikan masalah Non-ASN**

02

Memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta **digital dan data scientist** secara terukur

03

Merekrut **CPNS** dengan sangat selektif

04

Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan **terdampak oleh transformasi digital**



# Mekanisme Pengadaan CPNS

\*PermenPANRB No. 27/2021 juncto PermenPANRB No. 52/2021 tentang Pengadaan CPNS

## FORMASI UMUM

Pelamar Umum

## FORMASI KHUSUS

1. Putra/putri lulusan terbaik/cumlaude (minimal 10%)
2. Diaspora
3. Putra/putri papua dan papua barat
4. Penyandang disabilitas (minimal 2%)

## SELEKSI CAT

Kelulusan berdasarkan NAB dan berperingkat terbaik

\*NAB disesuaikan dengan jenis formasi



# Mekanisme Pengadaan PPPK

\*PermenPANRB No. 14/2023 tentang Pengadaan PPPK dalam proses pengundangan

## FORMASI

Ketentuan diatur  
dalam Kepmen

## FORMASI DISABILITAS

Kuota minimal 2%  
dari total Formasi

**Mekanisme Seleksi PPPK  
diatur dalam Keputusan  
Menteri PANRB**

# Dampak Terhadap Pendidikan Sekolah Swasta

1. Berkurangnya Guru pada Sekolah Swasta
2. Pemberhentian Guru Swasta Karena Menjadi PPPK
3. Guru Swasta yang diberhentikan Namun Belum mendapatkan Tempat pada Sekolah Negeri
4. Sekolah Swasta potensi Kehilangan Guru terbaik di Sekolahnya.



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
2. Tes Inteligensia Umum (TIU);  
dan
3. Tes Karakteristik Pribadi  
(TKP).

**PNS**

**Seleksi  
Adm inistra si**

**Seleksi  
Kom petensi  
Da sa r  
(SKD)**

**Seleksi  
Kom petensi  
Bid ang  
(SKB)**

menilai kompetensi bidang  
yang dimiliki oleh pelamar  
dengan standar kompetensi  
bidang sesuai kebutuhan  
jabatan.

**PPPK**

**Seleksi  
Adm inistra si**

**Seleksi  
Kom petensi**

**Wawan cara**

mempertimbangkan integritas  
dan moralitas

1. Kompetensi Teknis;
2. Kompetensi Manajerial; dan
3. Kompetensi Sosial Kultural.



**1** E-MATERAI: peserta banyak mengeluhkan terjadinya *error* pada pembubuhan e-materai

**2** SISTEM PENDAFTARAN FORMASI KHUSUS GURU: pada beberapa instansi, formasi yang tersedia tidak dapat dilamar oleh peserta yang *eligible* sesuai ketentuan pada KepmenPANRB 649/2023

**3** FORMASI EKS THK-2/TENAGA NON ASN: Tidak Tersedianya Formasi Jabatan untuk Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN yang tidak diusulkan oleh KLD



# Memastikan Kebutuhan CASN

1

Pemetaan Kebutuhan Instansi Sesuai dengan Kualifikasi dan Kebutuhan Jabatan

2

Identifikasi Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan Unit Kerja Bagi Pelamar Yang Berasal dari Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN

3

Memperhatikan dan Mengikuti Tahapan Pengadaan CASN sesuai dengan Jadwal Yang Telah Ditetapkan



## Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengangkatan PPPK

Keterbatasan  
Anggaran Untuk  
Membayar  
Penghasilan

- Kurangnya DAU
- Perbedaan Persepsi

Keterbatasan  
Usulan  
Formasi KLD

- Tidak ada Peta Jabatan Terkait ABK
- Kelebihan SDM dalam 1 Jabatan
- Data Yang Tidak Valid

Kualifikasi dan  
Jenis Jabatan Yang  
Tidak Sesuai/Tidak  
Memenuhi Syarat  
Jabatan

- Keterbatasan Jenis Jabatan
- Persyaratan Minimal Tidak Terpenuhi dalam Jabatan



## Perencanaan & Pengadaan CASN

Surat B/1527/M.SM.01.00/2023 perihal Status dan Kedudukan Eks Thk-2 dan Tenaga Non ASN



01

PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;

02

Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini

03

PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya





# panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# TERIMA KASIH



@kempnrb



@kemenpanrb



www .menpan.go.id



@Kementerian PANRB